

**PENDEKATAN *COMMAND CONTROL* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* DI DESA SERDANG KULON
KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG**

Awaliyyatul 'Inayah^{1(a)}, Irvan Arif Kurniawan^{2(b)}, Yusmedi Yusuf^{3(c)}

^{1,2,3}*Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang*
^{a)}*awaliyyatul@gmail.com*, ^{b)}*iakurniawan@unis.ac.id*, ^{c)}*yusmedi@unis.ac.id*

**INFORMASI
ARTIKEL**

Article History:

Dikirim:

15-08-2023

Diterbitkan Online:

13-10-2024

Kata Kunci:

Kebijakan Sosial,
Implementasi, Command
Control, Stunting

Keywords:

*Social policy, Implementation,
Command Control, Stunting*

Corresponding Author:

awaliyyatul@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pendekatan *command control* dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan *stunting*. Bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dalam pencegahan dan penanganan *stunting* di Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Meskipun tingkat penurunan angka *stunting* terbilang cukup baik, akan tetapi masih terdapat beberapa masalah yang ditemukan. Untuk melihat implementasi dengan pendekatan *command control* digunakan teori Van Metter dan Van Horn, dipilih karena terdapat indikator lingkungan eksternal yang dianggap relevan dengan permasalahan yang ada dalam proses implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan *stunting* di Desa Serdang Kulon, sudah cukup optimal. Adapun faktor yang masih belum optimal yaitu terkait dengan kondisi eksternal dan terkait disposisi atau sikap implementor mengenai tanggapan terkait kendala yang muncul pada proses implementasi kebijakan.

ABSTRACT

This research discusses the command control approach in the implementation of stunting prevention and handling policies. It aims to describe the implementation of stunting prevention and handling in Serdang Kulon Village, Panongan Sub-district, Tangerang Regency. Although the rate of decline in stunting rates is quite good, there are still several problems found. To see the implementation with a command control approach, Van Metter and Van Horn's theory was used, chosen because there are external environment indicators that are considered relevant to the problems that exist in the implementation process. The research used a descriptive qualitative approach. The results showed that the implementation of stunting prevention and handling policies in Serdang Kulon Village was quite optimal. The factors that are still not optimal are related to external conditions and related to the disposition or attitude of implementors regarding responses related to obstacles that arise in the policy implementation process.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i3.825>

PENDAHULUAN

Stunting disebabkan oleh asupan gizi yang buruk selama kehamilan dan masa balita. Pengetahuan ibu yang buruk tentang kesehatan dan gizi pra dan pasca melahirkan, terbatasnya layanan kesehatan seperti perawatan antenatal dan layanan pasca melahirkan, dan akses yang buruk terhadap makanan bergizi, sanitasi dan air bersih juga berkontribusi. Multifaktorial ini membutuhkan intervensi, yaitu pada 1000 hari setelah lahir (Agustina, 2022). *Stunting* pada masa kanak-kanak dikaitkan dengan keterlambatan perkembangan motorik dan penurunan tingkat kecerdasan. Selain itu, penurunan fungsi kekebalan, perubahan metabolisme, penurunan perkembangan motorik, penurunan nilai kognitif, dan penurunan nilai akademik dapat terjadi. Mandal Gc menjelaskan bahwa anak yang menderita *stunting* tumbuh menjadi orang dewasa yang berisiko mengalami obesitas, toleransi glukosa, penyakit jantung koroner, hipertensi, osteoporosis, serta penurunan performa dan produktivitas (Kusumawati et al., 2015). De Onis & Branca menyatakan bahwa *stunting* bertanggung jawab atas satu juta kematian anak setiap tahunnya. *Stunting* pada anak yang bertahan hidup dapat menyebabkan peningkatan morbiditas, penurunan kognitif, perawakan pendek, peningkatan risiko kematian perinatal dan neonatal, penurunan produktivitas dewasa, dan peningkatan penyakit kronis (Yanti et al., 2020). Selain itu Aguayo & Menon masih dalam (Yanti et al., 2020) menyatakan bahwa pertumbuhan seorang anak mencerminkan keadaan masyarakat di negara tersebut. *Stunting* yang terjadi pada usia emas anak dapat menjadi indikator subjektif dari pemerataan dan kesejahteraan sosial.

Pemerintah mengatur undang-undang terkait permasalahan *stunting* dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Kini pemerintah telah menjadikan penanganan *stunting* sebagai prioritas nasional yang diperbaharui dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Peraturan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pencapaian tujuan penurunan *stunting* di bawah mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Peraturan Presiden ini merupakan bentuk kesepakatan antara kementerian dan lembaga,

pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk melakukan upaya terpadu dalam percepatan penurunan *stunting* terintegrasi. Kemudian agar program nasional dapat terintegrasi dengan baik dan tepat sasaran sampai ke desa-desa, maka pemerintah daerah yaitu Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Tangerang.

Peraturan tersebut akan menjadi acuan untuk program pencegahan *stunting* nasional. Mencegah *stunting* merupakan bagian dari program yang berfokus pada pembangunan kesehatan, karena penting untuk menjaga pertumbuhan sejak usia dini. Mengingat dampak *stunting* yang sangat memengaruhi keadaan Negara salah satu dampaknya adalah terhadap perekonomian. Berdasarkan data *World Bank Investing in Early Years Brief* 2016 dalam (Ananda, 2020), dijelaskan bahwa *stunting* dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar tenaga kerja serta memperburuk ketimpangan. Catatan Bank Dunia menunjukkan bahwa pertumbuhan yang lebih lambat dapat menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan dalam jangka panjang. Mengingat PDB Indonesia sebesar Rp13.000 triliun, potensi kerugian dari pertumbuhan yang lambat diperkirakan mencapai Rp260-390 triliun per tahun. Ketika dewasa, anak-anak yang mengalami *stunting* memiliki peluang 20% lebih sedikit untuk memperoleh penghasilan dibandingkan anak-anak yang tidak mengalami *stunting*, alhasil berdampak buruk bagi kesejahteraan anak (masyarakat) itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menjalankan program pencegahan dan penanganan *stunting* ini agar tepat sasaran. Salah satunya di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Kabupaten Tangerang adalah salah satu kabupaten dengan wilayah zona kuning untuk kasus *stunting*, dengan menempati posisi ke-6 dari 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten (Kusnandar, 2022). Menurut Pusat Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGM), hingga tahun 2022 ada sekitar 800 anak di Kabupaten Tangerang yang mengalami *stunting* atau gizi buruk kronis yang menghambat pertumbuhan dan membuat mereka lebih kecil dari rata-rata anak seusianya (Ma'arif, 2022). Tingginya kasus di Kabupaten Tangerang

mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang. Sesuai regulasi yang ada, saat ini pemerintah kabupaten tangerang sedang menggencarkan gerakan pencegahan dan penanganan *stunting* di tiap-tiap kecamatan dan desa-desa yang ada di kabupaten Tangerang, hal ini dilakukan agar dapat menekan kasus *stunting* di angka 14% pada tahun 2024 mendatang.

Desa Serdang Kulon merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, dimana pemerintah desanya aktif melakukan kegiatan ataupun program yang bertujuan untuk mencegah dan menangani *stunting* untuk kemajuan desa dan kepentingan masyarakatnya. Jumlah penduduk di desa serdang kulon sebanyak 12.721 orang, dengan rata-rata penghasilan yang beragam, akan tetapi didominasi dengan penghasilan yang masih berada dibawah upah minimum regional (UMR), karena profesi yang didominasi oleh Petani dan Pedagang, *stunting* juga dapat terjadi karena masih banyaknya warga desa yang tidak mendapatkan pendidikan secara layak. Pada kecamatan panongan khususnya di desa Serdang Kulon, anak yg terindikasi *stunting* pada tahun 2020 berjumlah 15 orang anak dan pada tahun 2021 naik menjadi 64 orang anak, dan pada tahun 2022 berhasil turun kembali menjadi 31 orang anak. Walaupun dapat dikatakan menurun jumlah ini masih tergolong besar. Dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1: Data Anak Terindikasi *Stunting* Desa Serdang Kulon Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Anak Terindikasi <i>Stunting</i>
2020	15 Anak
2021	64 Anak
2022	31 Anak

Sumber: Puskesmas Panongan, 2023

Walaupun angka *stunting* menurun, terdapat beberapa kendala yang muncul yaitu orang tua atau masyarakat yang belum teredukasi mengenai hal ini dan menganggap bahwa *stunting* bukanlah suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Liem et al (2019) bahwa persepsi sosial tentang *stunting* di Kabupaten Tangerang menunjukkan istilah *stunting* yang dipahami oleh masyarakat

bukanlah terkait faktor kekurangan gizi, sehingga membuat kesadaran masyarakat atau partisipasi masyarakat akan pentingnya *stunting* sangatlah rendah. Karena ketidaktahuan dan kurangnya partisipasi masyarakat tersebut berdampak pada tingginya angka *stunting*.

Karena dampak ketika terindikasi *stunting* akan mengalami penurunan kemampuan kognitif, memiliki resiko tinggi terkena penyakit infeksi dikarenakan rendahnya imun, kelebihan berat badan bahkan obesitas, sampai terkena penyakit tidak menular (PTM). Dimana hal tersebut akan memengaruhi jenis pekerjaan yang akan diperoleh, turunya produktivitas dan juga hasil pendapatan yang akan diterima (Khotimah, 2022). Hal tersebut tentu berdampak pada masalah perekonomian masyarakat pada usia produktif kelak.

Kesalahan persepsi mengenai *stunting* yang terjadi, dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait *stunting*. Penyebab lainnya karena pola asuh keluarga, dan sanitasi yang belum merata sehingga menyebabkan lingkungan sekitar kotor dan tercemar.

Eyestone menyebutkan bahwa kebijakan publik secara luas didefinisikan sebagai hubungan antara lembaga pemerintah dan lingkungannya (Nur & Guntur, 2021). Anderson dalam Widodo (2021) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tanggapan sistem politik terhadap tuntutan dan dukungan dari lingkungannya.

Sedangkan implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan (Agustino, 2022:144). Sedangkan Van Metter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Andani et al., 2019).

Implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa pendekatan, salah satunya adalah pendekatan *top down*. Pendekatan *top down* menggunakan konsep pemetaan dari atas kebawah untuk mengidentifikasi keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan. Cf Hogwood and Gunn (1984) dalam Kasmad (2018) menambahkan bahwa pendekatan ini disebut sebagai '*policy centered*' karena hanya berfokus pada kebijakan dan mencoba menangkap fakta tentang apakah kebijakan tersebut akan mencapai tujuannya ketika diterapkan atau tidak. Pendekatan implementasi

top down cocok untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, yaitu menentukan apakah tujuan kebijakan di lapangan dapat dicapai secara memadai. P.deLeon and L.deLeon, (2002) mengatakan bahwa pendekatan ini sering disebut pendekatan *command and control*, yang secara harfiah berarti mengeluarkan perintah dan memantau pelaksanaannya (Kasmad, 2018).

Disebut pendekatan *command and control*, karena keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada kejelasan instruksi yang diberikan kepada bawahan oleh atasan, dan bagaimana atasan mendorong bawahan untuk melaksanakan instruksi tersebut, kejelasan instruksi atasan terkait dengan kejelasan definisi tujuan kebijakan. Karena orang yang memiliki otoritas akhir untuk memahami dan menginterpretasikan tujuan kebijakan adalah atasan, maka interpretasi tujuan kebijakan berupa perintah dan petunjuk dari atasan. Dalam realisasi kebijakan tidak hanya sekadar membuat atasan memahami dengan jelas tujuan kebijakan dan mampu mengimplementasikannya sebagai instruksi kerja yang lebih spesifik. Akan tetapi mampu memonitor pelaksanaan terkait perintah-perintah kepada bawahannya (Kasmad, 2018). Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan *stunting* di Desa Serdang Kulon Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang. Dengan menggunakan teori Van Metter dan Van Horn untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi.

Faktor tersebut yaitu standar dan sasaran kebijakan, dimana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Jika standar dan tujuan kebijakan tidak jelas, multitafsir akan muncul, yang dengan mudah menimbulkan konflik di antara entitas eksekutif atau para implementor (Siregar, 2022). Selanjutnya adalah sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, yaitu terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya finansial atau dana, dan sumber daya waktu (Kurniawan & Maani, 2020).

Ketiga yaitu komunikasi antar organisasi, yaitu koordinasi dan kerjasama antar lembaga diperlukan untuk keberhasilan program, karena program membutuhkan pelaksana atau implementor program untuk mendukung dan berkoordinasi dengan lembaga lain.. Semakin baik koordinasi dan komunikasi antara pihak-

pihak yang terlibat dalam proses implementasi, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dan sebaliknya (Agustino, 2022). Kelima adalah karakteristik agen pelaksana, kinerja implementasi kebijakan oleh organisasi pelaksana dipengaruhi oleh karakteristik dan tanggapan yang sesuai dengan para agen pelaksana. Hal ini berhubungan dalam konteks kebijakan yang diterapkan. Penegak kebijakan harus tetap ketat dan disiplin di beberapa kebijakan. Pada situasi lain membutuhkan badan pelaksana yang demokratis dan persuasif. Penentuan agen pelaksana kebijakan juga dipengaruhi oleh ruang lingkup atau luas area kebijakan (Kurniawan & Maani, 2020).

Selanjutnya adalah kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini meliputi sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana pemangku kepentingan mendukung implementasi kebijakan, dan karakteristik partisipan yaitu implementasi kebijakan yang menunjukkan sikap mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik di lingkungannya, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan tersebut (Siregar, 2022). Dan terakhir ada disposisi yang meliputi tiga hal penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk mengimplementasikan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor (Siregar, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan filosofi postpositivisme digunakan untuk memeriksa kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah instrument kunci dengan teknik pengumpulan data secara triangulasi. Lokasi penelitian adalah Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian diolah melalui langkah awal reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Dalam pemilihan informan penelitian ini, peneliti menggunakan sampel purposive, informan penelitian dipilih

berdasarkan orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial yang peneliti teliti, yaitu Kepala Desa Serdang Kulon, Sekretaris Desa Serdang Kulon, Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Serdang Kulon, Ahli Gizi Puskesmas Panongan, Bidan Desa dan Masyarakat).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam program pencegahan dan penanganan *stunting* di Desa Serdang Kulon dapat berjalan dengan baik tidak lepas dari peran pemerintah desa dan pihak terkait yang memahami unsur sasaran dan tujuan terkait kebijakan pencegahan dan penanganan *stunting* dengan baik dan benar. Standar dalam melaksanakan kebijakan program pencegahan dan penanganan *stunting* di Desa Serdang Kulon sudah sesuai dan jelas karena merupakan program nasional yang berdasarkan pada permasalahan yang ingin diselesaikan oleh masyarakat. Tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kemudian, Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tangerang.

Sasaran dari program pencegahan dan penanganan *stunting* dimulai dari remaja, ibu hamil dan ibu menyusui, bayi dari 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) sampai anak usia 5 tahun. Sesuai dengan isi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, maka dilakukan percepatan penurunan *stunting*. Selain rutin untuk melakukan pemeriksaan posyandu baik untuk menerima vitamin maupun makanan tambahan. Upaya penurunan *stunting* terus dilakukan dan didukung dengan dibangunnya gedung *holistic integrative* yang dimana dalam satu lingkungan terdapat Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), dan juga Pendidikan Usia Dini (PAUD).

Sumber Daya

Dalam hal mengenai sumber daya manusia di Desa Serdang Kulon, tentu berkaitan dengan pihak-pihak yang menjalankan program pencegahan dan penanganan *stunting*, semua pihak yang terlibat mau dan mampu menjalankan tugas dengan baik dan benar

dengan kata lain semua sumber daya yang terlibat memiliki kompetensi di setiap tahapan implementasinya. Baik dari kepala desa sebagai pemegang kekuasaan yang memberi arahan bagaimana program dapat berjalan supaya lebih terarah dan tepat sasaran, maupun pihak-pihak terkait yang langsung berperan aktif dilapangan yaitu Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Bidan Desa, ataupun Ahli Gizi yang semuanya saling berkaitan dalam mensukseskan program pencegahan dan penanganan *stunting*.

Adapun sumber daya dana dalam program pencegahan dan penanganan *stunting*, Kepala Desa menjelaskan bahwa alokasi dana sudah termasuk di dalam anggaran APBDes. Dimana pemerintah desa memaksimalkan dana dari APBDes yang ada, untuk dikelola secara baik dalam program *stunting* tersebut. Kemudian, Kepala Desa dan masyarakat juga sukarela membantu pendanaan secara mandiri demi terwujudnya desa Serdang Kulon yang bebas *stunting*. Dan dana yang ada sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat, karena menyesuaikan dengan program lain yang sama pentingnya.

Dalam menjalankan program *stunting* di Desa Serdang Kulon, pemerintah desa juga mengadakan sosialisasi terkait *stunting*, karena akan berpengaruh pada keberhasilan menurunkan angka *stunting* dan pencegahannya. Dalam hal ini sosialisasi termasuk ke dalam sumber daya waktu, karena merupakan suatu pemanfaatan waktu oleh para implementor agar lebih berdaya dan bermanfaat demi keberhasilan suatu program. Adapun sosialisai yang dilakukan yaitu 3 bulan sekali, akan tetapi kader PKK dan bidan desa selalu melakukan sosialisasi tumbuh kembang anak sebulan sekali setiap posyandu dilaksanakan. Kemudian kader-kader yang biasa bertugas di posyandu dikirim untuk melakukan pelatihan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten mengenai pencegahan dan penanganan *stunting*.

Komunikasi antar Organisasi

Dalam hal ini komunikasi antar organisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Serdang Kulon dengan pihak lain seperti PKK sudah dilakukan dengan berupa dikirimnya kader-kader Pokja 4 untuk mengikuti pelatihan mengenai bagaimana cara pencegahan dan penanganan *stunting* di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Pemerintah pusat juga mengadakan

sosialisasi pencegahan dan penanganan stunting yang wajib dihadiri oleh Kepala Desa secara langsung di tingkat Provinsi. Pemerintah Desa Serdang Kulon juga bekerja sama dengan PKK terkait program pencegahan dan penanganan stunting, dengan membentuk inovasi kegiatan terbaru yaitu Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), kegiatan tersebut berfokus pada edukasi kepada masyarakat khususnya para orang tua terkait bagaimana membuat makanan untuk anak-anak yang sehat dan bergizi, ini merupakan pembaharuan dari agenda kegiatan dapur kemanusiaan sebelumnya.

Hubungan yang baik antara PKK, Bidan Desa, juga Ahli Gizi diwujudkan dengan memiliki keseragaman terhadap tujuan kebijakan, yaitu pencegahan dan penanganan *stunting*. Hal yang dilakukan selain melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, dan lingkaran kepala untuk balita adalah melakukan edukasi mengenai makanan bergizi kepada ibu-ibu yang hadir di posyandu, dan bagaimana efek *stunting* agar para masyarakat sadar akan bahaya *stunting* bagi tumbuh kembang anak-anaknya kelak. Adapun ketika ada anak yang memang terindikasi *stunting* setelah diperiksa posyandu, maka pihak puskesmas Panongan akan melakukan penimbangan ulang untuk memastikan, setelah itu maka akan dirujuk ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut, karena anak yang terindikasi *stunting* dapat diakibatkan oleh penyakit seperti anemia ataupun infeksi saluran kencing, setelah itu baru dilakukan perbaikan gizi.

Kemudian puskesmas Panongan juga mengadakan posyandu remaja sebagai langkah pencegahan *stunting*, Posyandu remaja ini baru terdapat di 5 desa saja di Kecamatan Panongan yaitu desa Serdang Kulon, Ranca Iyuh, Ciakar, Mekar Jaya, dan Peusar. Kegiatannya sama seperti posyandu balita pada umumnya, hanya terdapat tambahan berupa pemberian vitamin penambah darah agar para remaja terbebas dari anemia yang dapat memengaruhi masa produktifitasnya kelak. Kegiatan lainnya yaitu Keping Emas “kelas pendamping periode emas” kegiatan ini dilakukan selama 3 bulan di 2 desa saja, salah satunya di desa Serdang Kulon. Kegiatan ini berfokus pada edukasi secara langsung dimulai dari ibu hamil dari segi pola makan yang bergizi, sampai anak berusia 2 tahun. Disebut periode emas karena targetnya dari ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun, dimana pada periode itu otak anak berkembang pesat sampai 80%, jika anak terkena *stunting* maka

asupan gizi otomatis tidak maksimal dan salah satu akibatnya dapat membuat perkembangan otak anak juga tidak maksimal. Kegiatan ini di danai oleh puskesmas Panongan pada awalnya, akan tetapi pemerintah Desa Serdang Kulon ikut berkontribusi juga pada pendanaan kegiatan tersebut. Ini membuktikan bahwa pemerintah Desa Serdang Kulon memiliki hubungan yang baik antar organisasi atau antar pelaksana lainnya yang terlibat dalam program *stunting* ini.

Karakteristik Agen Pelaksana

Pelaksana pemerintahan Desa Serdang Kulon memiliki sikap cepat tanggap dengan mengadakan langkah awal yaitu melakukan rebug *stunting* demi mengetahui bagaimana kondisi *stunting* yang terjadi pada waktu itu, untuk kemudian dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanganan *stunting*. Kader PKK, Bidan Desa ataupun Ahli Gizi yang bertugas perlu menyesuaikan dalam hal bersikap, agar orang tua tidak merasa tersinggung ketika anak yang diperiksa termasuk dalam keadaan pendek bahkan sangat pendek yang bisa diindikasikan terkena *stunting*, karena banyak orang tua yang tidak mau memeriksakan anaknya kembali ke posyandu untuk dipantau tumbuh dan kembangnya. Sehingga kader PKK, bidan desa atau ahli gizi yang bertugas biasanya memberi tahu orang tua anak tersebut bahwa anak tersebut gizinya kurang, dengan begitu orang tua mau menerima edukasi yang disampaikan oleh bidan desa mengenai makanan bergizi, pola makan yang baik agar berat badan dan tumbuh kembang si anak bisa berada di posisi normal kembali. Dengan kata lain para pelaksananya berkarakteristik cepat tanggap, lembut dan mengayomi, sehingga masyarakat mau mengikuti arahan dari pelaksana, dan juga ikut dalam pelaksanaan programnya. Kemudian juga sangat responsif, karena masyarakat lebih mudah memahami mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam menciptakan kesehatan bagi dirinya dan anak-anaknya. Masyarakat Desa Serdang Kulon juga menjelaskan bahwa mereka merasa nyaman untuk datang kembali ke posyandu karena pelayanan dan sikap yang baik dari para pelaksananya.

Kondisi Sosial Politik, Ekonomi, dan Politik

Dalam hal ini masyarakat Desa Serdang Kulon menanggapi kegiatan posyandu yang sudah berjalan dengan sangat positif, kegiatan

ini merupakan bentuk dari penerapan program pencegahan dan penanganan *stunting* di Desa Serdang Kulon, masyarakat khususnya para orang tua dan ibu hamil merasa terbantu dengan edukasi yang dilakukan oleh desa melalui kader-kader PKK dan bidan desa ataupun ahli gizi yang ada di setiap posyandu, juga dengan pemberian makanan tambahan (PMT) berupa telur secara rutin dan kegiatan dapur sehat atasi *stunting* (DASHAT), yang sangat membantu masyarakat dalam mengenal makanan yang baik dan bergizi bagi anak-anak, DASHAT sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan berupa edukasi dengan mencontohkan secara langsung bagaimana cara memasak untuk anak sesuai dengan usianya, kegiatan ini dilakukan secara bergilir dari satu RT ke RT lainnya.



Gambar 1. Kegiatan DASHAT di Desa Serdang Kulon

Sumber: PKK Desa Serdang Kulon, 2023

Masyarakat juga merasa terbantu dengan kegiatan pembangunan septic tank/ MCK/WC sebagai wujud desa peduli dengan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga mewujudkan lingkungan Desa ODF (Open Defecation Free) atau Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan bersih dan angka *stunting* dapat mengalami penurunan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengadakan kegiatan arisan sebagai medianya, jadi para warga melakukan arisan WC ini dengan dibantu dan diawasi oleh pemerintah Desa Serdang Kulon secara langsung, kegiatan arisan ini merupakan salah satu cara Desa agar membuat masyarakatnya

mau berupaya secara mandiri untuk membuat lingkungan tempat tinggalnya sehat.

Adapun mengenai kondisi ekonomi mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Di Desa Serdang Kulon tingkat ekonominya masih didominasi oleh buruh tani, dalam artian perekonomian masih ada ditingkat menengah kebawah dengan beberapa masyarakat yang berpendidikan rendah. Di Desa Serdang Kulon anak yang terindikasi *stunting* ada yang berasal dari keluarga yang secara ekonomi sudah bagus atau menengah ke atas. Jadi walaupun kondisi ekonomi di Desa Serdang Kulon masih dominan terhadap masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, akan tetapi anak yang terindikasi *stunting* di desa Serdang Kulon juga ada yang berasal dari keluarga yang ekonominya berkecukupan.

Sedangkan kondisi politik, pemerintah desa sendiri memberikan dukungan penuh terkait pencegahan dan penanganan *stunting* yang ada di Desa Serdang Kulon, selain menjalankan program yang sudah terlaksana melalui berbagai kegiatan. Pemerintah Desa akan terus berusaha untuk membuat inovasi-inovasi kegiatan lainnya terkait program pencegahan dan penanganan *stunting*, agar angka penurunan kasus *stunting* dapat terus meningkat kedepannya.

Walaupun Pemerintah Desa Serdang Kulon belum berhasil membuat kasus *stunting* menjadi 0 (nol) atau *zero stunting* akan tetapi *progress* yang dihasilkan sangat baik, sehingga Desa Serdang Kulon mendapat kunjungan dari Bank Dunia atau *World Bank* sebagai Desa percontohan atau *pilot project*. Kunjungan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Bank Dunia atau *World Bank* yang berjumlah lebih dari 5 orang dipimpin oleh Vice President for Human Development *World Bank*, yaitu Mamta Murthi. Kemudian juga hadir Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan, Staf Setwapres, dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TP2S) Setwapres yang berjumlah 6 orang, dan turut hadir juga Bapak Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Kunjungan ini dilakukan karena Desa Serdang Kulon berhasil menekan angka *stunting* dengan sangat baik dalam jangka waktu 1 tahun, kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara

langsung keberhasilan penurunan kasus *stunting* yang dilakukan Pemerintah desa sehingga dapat berjalan efektif dan memiliki dampak terhadap kualitas pelayanan Posyandu dan Puskesmas dalam rangka mempercepat penurunan *stunting*.

Disposisi

Respon pemerintah Desa Serdang Kulon terkait kebijakan pencegahan dan penanganan *stunting* sangat sigap dan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Yaitu dengan dilakukannya berbagai kegiatan untuk pencegahan *stunting*, dimana kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tangerang. Dengan begitu dalam hal kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, para aparatur kebijakan atau pemerintah desa sudah faham mengenai sasaran, tujuan dan hal-hal lain terkait kebijakan tersebut, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Bahkan Desa Serdang Kulon juga mendapat kunjungan oleh Bank Dunia karena berhasil menurunkan angka *stunting* dengan baik.

Adapun intensitas implementor dapat dilihat dengan bagaimana pemerintah desa menyikapi kendala yang muncul ketika proses implementasi kebijakan berlangsung. Kendala yang pertama adalah terkait masyarakat yang belum teredukasi secara menyeluruh terkait pemahaman *stunting*, kemudian kendala lainnya adalah perihal aplikasi untuk pendataan *stunting* yaitu aplikasi eHDW (Human Development Worker) yang masih mengalami *error system* dimana ketika sudah di input datanya justru tidak terdata karena tiba-tiba terhapus dengan sendirinya, sehingga perlu dilakukan input data kembali dan memakan banyak waktu.

Terakhir, berkaitan dengan pengukuran panjang badan yang belum optimal untuk bayi dan balita, dimana dipengaruhi oleh alat ukur yang belum memenuhi standar, alat ukur yang direkomendasikan adalah infantometer jenis board atau kayu yang kokoh, sedangkan yang ada di posyandu-posyandu masih belum menggunakan jenis tersebut. Sehingga data *stunting* yang diperoleh per-bulan Februari pada tahun ini di Desa Serdang Kulon sudah mencapai 27 anak, dimana jumlahnya

meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi pihak Puskesmas Panongan yaitu bagian Ahli Gizi menjelaskan bahwa angka ini perlu dilakukan pengecekan ulang melalui beberapa proses sehingga bisa ditemukan jumlah yang benar terkena *stunting*.

Tabel 2. Data Anak Terindikasi Stunting Desa Serdang Kulon Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Anak Terindikasi Stunting
2020	15 Anak
2021	64 Anak
2022	31 Anak
2023	27 Anak

Sumber: Puskesmas Panongan, 2023

Dalam menanggapi kendala tersebut para aktor pelaksana berupaya melakukan inovasi-inovasi baru dan tentunya melakukan edukasi secara terus menerus kepada masyarakat agar teredukasi secara menyeluruh. Kemudian selalu mendata anak-anak yang hadir dengan cermat sehingga mempunyai salinan data ketika data yang telah diinput kedalam aplikasi eHDW (Human Development Worker) atau aplikasi untuk pendataan *stunting* jika sewaktu-waktu hilang karena kendala *error system*. Dan terakhir adalah mengupayakan agar dapat memperbaharui peralatan pengukur panjang bayi agar kedepannya dapat merata keseluruhan posyandu yang ada di Desa Serdang Kulon.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan *stunting* di Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang sudah cukup optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (i) Pemahaman warga desa mengenai *stunting* yang semakin bertambah melalui edukasi dan inovasi kegiatan yang dilakukan, (ii) Sosialisasi yang rutin diadakan terkait *stunting* di Desa Serdang Kulon (setiap posyandu berlangsung dan melalui kegiatan DASHAT, (iii) Pembangunan WC/Septictank bagi masyarakat melalui agenda arisan yang difasilitasi oleh desa, (iv) Inovasi kegiatan yang dilakukan oleh desa dan Puskesmas berupa posyandu remaja, pembagian vitamin ke sekolah-sekolah, dan kegiatan "Keping Emas", (v) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) secara rutin menggunakan dana sukarela dari kepala desa dan

masyarakat, sehingga menekan angka *stunting* dengan baik. Sehingga angka penurunan anak yang terkena *stunting* terus berkurang. Kemudian, masih terdapat kendala yang muncul, yaitu pada aspek disposisi dimana terkait penggunaan aplikasi eHDW yang sering mengalami *error system* dan penggunaan alat ukur di posyandu-posyandu desa yang masih belum sesuai dengan standar yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan *command control* sudah cukup optimal karena berhasil dalam aspek Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Hubungan antar organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Kondisi sosial, politik., dan ekonomi. Adapun faktor yang masih belum optimal yaitu terkait dengan kondisi eksternal dan terkait disposisi atau sikap implementor mengenai tanggapan terkait kendala yang muncul pada proses implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. (2022). *Faktor-faktor Penyebab Kejadian Stunting pada Balita*. Kementerian Kesehatan. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1529/faktor-faktor-penyebab-kejadian-stunting-pada-balita?cv=1
- Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*. Alfabeta.
- Ananda, C. F. (2020). *Polemik Stunting dan Pembangunan*. <https://feb.ub.ac.id/polemik-stunting-dan-pembangunan/>
- Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 5(3), 328–336. <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap>
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. <https://www.researchgate.net/publication/327762798>
- Khotimah, K. (2022). Dampak Stunting dalam Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 2(1).
- Kurniawan, W., & Maani, D. K. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Meter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 67–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
- Kusnandar, V. B. (2022). *Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Banten Menurut Kabupaten/Kota (2021)*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/daftar-kabupaten-dengan-prevalensi-balita-stunting-tertinggi-di-banten-pada-2021>
- Kusumawati, E., Rahardjo, S., & Sari, H. P. (2015). Model Pengendalian Faktor Risiko Stunting pada AnakUsia di Bawah Tiga Tahun. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, 9(3), 249–256. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v9i3.572>
- Liem, S., Panggabean, H., & Marta, R. F. (2019). Persepsi Sosial Tentang Stunting Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 18(1), 37–47.
- Ma'arif, A. S. (2022). *Pemkab Tangerang berupaya turunkan angka stunting jadi 14 persen*. Antara Banten. <https://banten.antaranews.com/berita/228277/pemkab-tangerang-berupaya-turunkan-angka-stunting-jadi-14-persen>
- Nur, A. C., & Guntur, N. M. (2021). *Analisis Kebijakan Publik*. <https://www.researchgate.net/publication/350619992>
- Peraturan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi*.
- Peraturan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tangerang*.

- Peraturan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting*.
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). *Jurnal Ilmu Sosial (JISOS)*, 1(7), 713–722. <http://bajangjournal.com/index.php/JISOS>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*.
- Yanti, N. D., Betriana, F., & Kartika, I. R. (2020). Faktor Penyebab Stunting Pada Anak: Tinjauan Literatur. *Real In Nursing Journala (RNJ)*, 3(1), 1–10. <https://ojs.fdk.ac.id/index.php/Nursing/index>